

Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja Keuangan pada BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2016-2018

Oleh:
Shelly Andriani
3170111060

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah salah satunya menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang berguna sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Tujuan analisis ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data keuangan APBD di BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2016-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) rasio kemandirian tahun 2016-2018 dengan rata-rata 60,15% yang dikategorikan sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, (2) rasio efektivitas sudah sangat efektif dengan rata-rata 110,48%, (3) rasio efisiensi sudah sangat efisien dengan rata-rata sebesar 3,01%, (4) rasio aktivitas masih diprioritaskan untuk belanja rutin (operasi) dengan rata-rata 80,27% daripada untuk belanja modal (pembangunan) dengan rata-rata hanya 17,99%, (5) rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif kecuali pada pos belanja rutin (operasi) yang ada negatif, (6) rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintahan pusat atau provinsi sangat tinggi dengan rata-rata 62,26%, (7) rasio derajat desentralisasi fiskal dalam skala cukup dalam melaksanakan otonominya dengan rata-rata 37,43%, (8) analisis varians dapat dikategorikan baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Analisis Varians

***Regional Financial Ratio Analysis as Financial Performance Assessment at
BPKAD Yogyakarta City 2016-2018***

Shelly Andriani
3170111060

Regional Autonomy is the right, authority and obligation of an autonomous region to regulate and administer Government Affairs and the interests of the local community in accordance with applicable laws. One way to assess the performance of local governments in managing regional finances is the use of regional financial ratio analysis, which is useful for evaluation and consideration for decision making. The purpose of this analysis is to determine the financial performance of the Yogyakarta City government. The data used in this analysis are APBD financial data at BPKAD Yogyakarta City in 2016-2018. The results of the analysis show that: (1) the independence ratio in 2016-2018 with an average of 60.15% which is categorized as moderate and has a participatory relationship pattern, (2) the effectiveness ratio is very effective with an average of 110.48%, (3)) the efficiency ratio is very efficient with an average of 3.01%, (4) the activity ratio is still prioritized for routine expenditure (operations) with an average of 80.27% than for capital expenditure (development) with an average of only 17, 99%, (5) the growth ratio shows positive growth except for negative routine (operational) expenditure posts, (6) the ratio of regional financial dependence on the central or provincial government is very high with an average of 62.26%, (7) The ratio of the degree of fiscal decentralization on a sufficient scale in carrying out its autonomy with an average of 37.43%, (8) analysis of variance can be categorized as good.

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio, Area of Financial Dependency Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Variance Analysis.